ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

SKRIPSI

Oleh:

HASAN BASRI
NIM. 0501162101

Program Studi

EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M/ 1443 H

ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2021 M/ 1443 H

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT

Oleh:

HASAN BASRI
NIM. 0501162101

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 20 Agustus 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Sri Ramadhani, MM	**Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si**
NIDN. 2015107502	**NIDN. 2028129001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Imsar, M.Si
NIDN. 2003038701

ABSTRAK

Hasan Basri, 0501162101, Analisis Implementasi Perencanaan dan Partisipatif MasyarakatDalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Sri Ramadhani, MM. dan Pembimbing Skripsi II oleh Bapak Dr. Nur Ahmadi Bi Rahamani, M.Si.

Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang bersifat berdaya guna dan manfaatnya dapat benar- benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Bukan pembangunan yang hanya dibuat semata-mata untuk pajangan saja agar terlihat ada pembangunan tetapi manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat**.** Seperti pembangunan untuk penyediaan air bersih untuk warga desa Pantai Cermin yang tidak merata, dan juga bagaimana cara pemerintah desa setempat untuk mengajak para warga ikut berpartisipasi dalam pembangunan, agar pembangunan infrastruktur desa jalan sesuai kebutuhan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan dan bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pantai Cermin Kabupaten Langkat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan sudah berjalan cukup baik seperti dalam perencanaannya, untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunannya dikatakan masih cukup rendah terbukti dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dan juga karena tidak meratanya ajakan untuk berpartisipasi dari pemerintah desa setempat, dan untuk bagaimana peran pemerintah sendiri dalam meningkatkan partisipasi masyarakatnya juga hanya sebatas dengan mengajak gotong-royong dan musrenbang saja.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Partisipatif Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, karunia serta keridhaan-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan, baik secara fisik maupun psikis untuk melakukan proses penyelesaian penulisan ilmiah Skripsi S1 yang berjudul **Analisis Implementasi Perencanaan dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat** dengan sebaik-baiknya.

Tidak luput pula, shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang dengan berkatnya menjadi sebab segala urusan menjadi mudah, segala kesulitan menjadi kesempatan dan peluang yang berharga. Benarlah hanya bila dengan cinta, segala kesulitan bisa diubah menjadi momentum yang akan dikenang dengan senyuman kebijaksanaan.

Tulisan ini tentu masih jauh dari kata sempurna, namun penulis akan sangat berterima kasih kepada semua pihak yang dengan kebijaksanaannya membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, petunjuk, bimbingan dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan ini. Oleh karenanya, penulis ingin memberikan penghormatan dan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

3. Bapak Imsar, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
4. Ibu Sri Ramadhani, MM, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan arahan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Semoga Ibu dan keluarga diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Swt.
5. Bapak Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan saran-saran serta membimbing dengan sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan keluarga diberikan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Swt
6. Bapak Muhammad Arif selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mendidik dan mengajar sehingga penulis memperoleh banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama menjadi mahasiswa Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Seluruh Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan selama proses administrasi.
9. Terakhir terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang turut berpengaruh dalam penulisan yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu. Semoga Allah Swt. senantiasa melindungi kita semua.

Penulis telah berupaya menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik mungkin, dan menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan

kesempurnaan karya sederhana ini. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Medan, 10 Agustus 2021

penulis,

Hasan Basri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Perumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Kajian Teoritis 13
   1. Desa 13
   2. Perencanaan 15
   3. Implementasi Perencanaan 20
   4. Partisipasi Masyarakat 21
   5. Pembangunan 31
   6. Infrastruktur Publik 39
B. Penelitian Terdahulu 42
C. Kerangka Konseptual 45

BAB III METODE PENELITIAN 45

A. Pendekatan Penelitian 45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 45
C. Subjek Penelitian.....46
D. Sumber Data.....46
E. Teknik Pengumpulan Data.....47
F. Teknik Analisis Data.....48

BAB IV TEMUAN PENELITIAN 50

A. Gambaran Umum Desa Pantai Cermin 50
   1. Geografi.....50
   2. Demografi 51
   3. Mata Pencaharian Pokok.....55
   4. Pemerintah Desa.....56
B. Temuan Penelitian.....58
C. Pembahasan Hasil Penelitian 60
   1. Analisis Implementasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat 60
   2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pembangunan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.....62
   3. Analisis Peran Pemerintah Desa Pantai Cermin untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat 64

BAB V PENUTUP.....66

A. Kesimpulan 66
B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA **68**

LAMPIRAN **72**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembangunan Infrastruktur Daerah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2018 4

Tabel 1.2 Data Pembangunan Infrastruktur Daerah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2019 5

Tabel 1.3 Data Pembangunan Infrastruktur Daerah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2020 6

Tabel 1.4 Data Kehadiran Gotong Royong Dusun Ampera Desa Pantai CerminTahun 2020 7

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian dan Penulisan 46

Tabel 4.1 Luas Wilayah Desa Pantai Cermin 51

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 51

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 52

Tabel 4.4 Usia Penduduk Berdasarkan Dusun 52

Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Umum Penduduk Berdasarkan Dusun 53

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Dusun 54

Tabel 4.7 Sarana Tempat Ibadah Desa Pantai Cermin 55

Tabel 4.8 Mata Pencaharian Penduduk 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 44

Gambar 4.1 Peta Desa Pantai Cermin 50

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Cermin..... 58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi.....94

Lampiran 2 Hasil Wawancara.....69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara didirikan dengan satu tujuan utama, yakni untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Termasuk dalam hal ini antara lain adalah kemakmuran, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman bagi rakyatnya serta meningkatkan harkat dan martabat rakyat sebagai manusia. Oleh karena itu Negara membentuk suatu organisasi yang bernama pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan Negara untuk merencanakan, menetapkan tujuan, dan sasaran. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat di Daerah maka segala program perencanaan, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya.[1]

Suatu pembangunan adalah salah satu faktor pendukung dalam perekonomian dan juga menyejahterakan masyarakat. Begitu juga dengan partisipasi, pembangunan tanpa ada partisipasi dan dukungan masyarakat dipastikan bahwa pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil pengamatan sementara menunjukkan indikasi masih adanya kesenjangan, khususnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut masih jauh dari harapan. Padahal pembangunan infrastruktur merupakan determinan penting untuk percepatan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta.

---

[1]Husnul Imtihan, Dr. Wahyunadi, Dr. M.Firmansyah. *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Mataram. Vol. 11 No. 1. 2017. h. 1- 2.

Di Desa Pantai Cermin pembangunan infrastruktur menjadi permasalahan yang turun temurun dari dulu. Serta masyarakat yang kurang sadar akan pembangunan. Bapak Dahlan selaku masyarakat mengatakan:

"Pembangunan di desa ini masih belum terlaksana sepenuhnya dan masih kurang maksimal serta kurangnya pemerataan pembangunan di dusun- dusun, dalam pembangunan tidak berdasarkan aspirasi masyarakat".[2]

Mengutip dari hasil wawancara dengan pak dahlan bahwa pembangunan di daerah tersebut belum mengenai sasaran yang tepat, dan juga pembangunan tersebut belum terlaksana semuanya hanya beberapa saja yang sudah di implementasikan (dilaksanakan). Namun, yang sudah dilaksanakan juga masih banyak kontra dengan masyarakat.

Pembangunan tidak tepat sasaran yang terdapat di Desa Pantai Cermin seperti pembangunan pos kamling yang ada di dusun ampera,pembangunan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga tidak di butuhkan oleh masyarakat di dusun tersebut,sebab di daerah tersebut tergolong daerah yang aman. Masyarakat lebih membutuhkan adanya pembangunan pengadaan air bersih, karena ketika musim kemarau air di daerah tersebut menjadi kuning dan tidak bisa di gunakan.

Pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan yang bersifat berdaya guna dan manfaatnya dapat benar- benar dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Bukan pembangunan yang hanya dibuat semata-mata untuk pajangan saja agar terlihat ada pembangunan tetapi manfaatnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, lebih tepatnya pembangunan tersebut tidak tepat sasaran.

Pembangunan merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang

---

[2]Bapak Dahlan, Hasil Wawancara Pribadi, Tokoh Masyarakat Desa Pantai Cermin, (Langkat 19 Oktober 2020 Pukul 14.30 WIB)

tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, dan di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.[3] Menurut Bapak Komeri Edi selaku Kepala Desa Pantai Cermin:

"Sudah beberapa kali mengalami kegagalan dalam pembangunan di desa ini. Hal tersebut di akibatkan pertama karena waktu yang kurang maksimal. Kedua juga karena dukungan dan partisipasi masyarakat yang sangat kurang dalam melaksanakan pembangunan desa"[4]

Dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara dengan bapak Komeri Edi selaku Kepala Desa Pantai Cermin bahwa dalam pembangunan di daerah pantai cermin masih ada kegagalan dalam proses pelaksanaannya akibat dari waktu yang sangat kurang maksimal dan juga partisipasi serta dukungan masyarakat yang kurang dalam pembangunan. Sehingga pembangunan tersebut tidak berjalan dengan lancar.

Berdasarkan pengamatan sementara, faktanya yang terjadi di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Langkat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Sebatas gotong-royong membersihkan pinggiran parit saja sudah enggan, masyarakat tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka daripada ikut serta dalam kegiatan gotong-royong tersebut.

---

[3]Arius Kambu, *Perencanaan Partisipatif dengan Pendekatan Fenomenologi Di Distrik Kombut Kabupaten Boven Digoel.* Jurnal Keuda. Vol. 2 No. 2. h. 2

[4]Bapak Komeri Edi, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Pantai Cermin, (Langkat 20 Oktober 2020 Pukul 16.00 WIB)

Tabel 1.1

Data Pembangunan Infrastruktur Daerah Desa Pantai Cermin

Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2018

No	Jenis Pembangunan	Tempat Pembangunan
1	Perbaikan jalan TPU Uk. 500 m	Dusun Teladan
2	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Ampera
3	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Teladan
4	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Mandailing
5	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Wampu
6	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Pangkal Pasar
7	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Teluk Nibung
8	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Mergat
9	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Pematang Rambai
10	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Sei Rebat
11	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Getek II
12	Pembangunan Posyandu Uk. 2,5 m x 3 m	Dusun Getek I
13	Pengadaan Lapangan Sepakbola	Dusun Sei Rebat
14	Perawatan Pinggir Jalan dan Parit	Dusun Teladan

(Sumber: Buku Administrasi Desa Pantai Cermin, 2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, daridata pembangunan tahun 2018, pembangunan di desa Pantai Cermin memiliki 14 Pembangunan yang berfokus pada pembangunan posyandu di beberapa dusun, dan juga selebihnya pembangunan lain yang sudah direncanakan sebelumnya.

Tabel 1.2

Data Pembangunan Infrastruktur Daerah Desa Pantai Cermin

Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2019

No	Jenis Pembangunan	Tempat Pembangunan
1.	Rabat Beton Uk. 45m x 2m x 0.15m	Gg. Wakaf Dusun Mergat
2.	Rabat Beton Uk. 60m x 2m x 0.15 m	Gg. Sudar Dusun Mergat
3.	Rabat Beton Uk. 225m x 2.5m x 0.15 m	Dusun Wampu
4.	Rabat Beton Uk. 125m x 2m x 0.15m	Gg. Posyandu Dusun P. Rambai
5.	Rabat Beton Uk. 130m x 2.5m x 0.15m	Gg. Arian Dusun P. Sentang
6.	TPT Uk. 60m x 0.25m x 0.80m	Gg. Masjid Dusun Mandailing
7.	Perawatan Jalan Sirtu	Gg. Swadaya Dusun T. Nibung
8.	Perawatan Jalan Sirtu	Dusun Sei Rebat – Pem. Rambai – Sindang Sari
9.	Perehaban Musholla Nurul Hikmah	Dusun Pangkal Pasar
10.	Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Nurul Iman	Dusun Mandailing
11.	Pembangunan Lapangan Olahraga	Dusun Wampu
12.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5m x 2.5m	Dusun Pangkal Pasar
13.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5mx 2.5m	Dusun Teluk Nibung
14.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Mandailing
15.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Mergat
16.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Wampu
17.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Getek I
18.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Getek II
19.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Sei Rebat

20.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Pematang Rambai
21.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Teladan
22.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Ampera
23.	Pembangunan Poskamling Uk. 2.5 x 2.5m	Dusun Pematang Sentang

(Sumber: Buku Administrasi Desa Pantai Cermin, 2019)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa Data Pembangunan yang terjadi di Desa Pantai Cermin pada tahun 2019 melakukan peningkatan dari tahun sebelumnya.dapat dilihat pada tabel di atas ada 23 item pembangunan yang dilaksanakam di tahun 2019. Pembangunan tersebut berfokus pada pembangunan pos kamling setiap dusun.

Tabel 1.3

Data Pembangunan Infrastruktur Daerah Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2020

No	Jenis Pembangunan	Tempat Pembangunan
1	Normalisasi Tambahan Paralon 3 x 300 m	Dusun Sei Rebat
2	Peninggian Tanggul 4 x 1000 m	Dusun Pematang Sentang
3	Perawatan Air Bersih	Dusun Wampu
4	Pembuatan Parit Pembuangan ke sungai Uk. 1m x 1500m	Dusun Ampera
5	Pembuatan Parit Pembuangan ke sungai Uk. 1m x 1500m	Dusun Teladan
6	Pembangunan Gapura Pemabatas Desa	Dusun Pangkal Pasar
7	Perehaban Jembatan	Dusun Pematang Sentang

8	Renovasi Masjid Nurul Hasanah	Dusun Teladan

(Sumber: Buku Administrasi Desa Pantai Cermin, 2020)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat di lihat bahwa pembangunan yang dilakukan pada tahun 2020 hanya beberapa pembangunan saja dan juga ada sebagian pembangunan untuk menyelesaikan pembangunan di tahun 2019 yang belum rampung.

Tabel 1.4

Data Kehadiran Gotong Royong Dusun Ampera Desa Pantai Cermin Tahun 2020

No	Kegiatan	Jumlah KK	Kehadiran
1	Pembersihan parit dan jalan	187	85
2	Pengecoran masjid Nurul Hasanah	187	70
3	Perataan sirtu jalan	187	69
4	Menanam pohon di pinggir jalan	187	55
5	Membuat parit pembuangan	187	71

(Sumber: Buku Administrasi Desa Pantai Cermin, 2020)

Dari data kehadiran gotong royong di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang ada di daerah tersebut. Dari jumlah kepala keluarga dan jumlah yang hadir sangat jauh perbandingan di antara keduanya.

Mekanisme perencanan pembangunan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura dilakukan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai pada Musrenbang Kecamatan belum melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan

perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang di hadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu tuntutan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta peran masyarakat. Di mana pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah yang baik untuk saat inimaupun kedepannya adalah pembangunan yang berdasarkan pemikirandan masukan dari masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukanakan lebih tepat sesuai kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran tentunya. Dalam Kegiatan Musrenbang Desa yang seharusnya melibatkan lapisan masyarakat di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Puranyatanya hanya merupakan kegiatan formalitas yang dihadiri olehperangkat Desa dan Kecamatan serta sebagian tokoh yang sama sekali tidak mewakili keseluruhan masyarakat Desa. Sehingga pembangunan yang di rencanakan bukan dari usulan-usulan dari masyarakat tetapi perencanaan pembangunan hanya di usulkan dari pihak pemerintah desa saja. pembangunan tersebut hanya berupa asumsi dan perkiraan saja dari aparat desa dan kecamatan.

Selain itu, perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalamperencanaan pembangunan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir dan juga pada pemeliharaan. Apakah masyarakat telah terlibat sepenuhnya

dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan atau peran masyarakat hanya sekedar sebagai pelengkap kegiatan seremonial semata.[5]

Terdapat dua hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam perencanaan pembangunan pemerintah perlu mengetahui apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya serta mau mendengarkan apa kemauan masyarakat. Kedua, pemerintah perlu melibatkan segenap kemauan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah perlu menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek pembangunan.[6]

Berdasarkan latar belakang di atas dan alasan saya untuk mengambil judul penelitian ini, karena desa pantai cermin merupakan salah satu desa yang terbilang luas dengan jumlah penduduk yang banyak serta di desa tersebut juga banyak anak muda yang berpendidikan tinggi namun tidak peduli dengan permasalahan pembangunan yang terjadi, hal ini yang melandasi saya untuk meneliti di desa pantai cermin, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Analisis Implementasi Perencanaan dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas maka penulis membuat identifikasi masalah di antaranya, yaitu:

1. Adanya ketidaksesuaian antara implementasi perencanaan pembangunan dengan hasil pembangunan.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

---

[5]*Ibid*

[6]*Ibid*, h. 3.

3. Kurangnya partisipatif (Keikutsertaan) masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Publik di desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Dari sekian banyaknya masalah tersebut dipilihlah satu atau dua dari masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang akan diteliti (lazim disebut dengan batasan masalah). Batasan masalah jadinya berarti pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi.[7]

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mencoba memberikan batasan masalah agar tidak terlalu meluas dan terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka peneliti membuat batasan masalah yaitu Perencanaan dan Partisipatif masyarakat..

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur publik di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung

[7]Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Peneltian Ekonomi,* (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 17.

Pura Kabupaten Langkat?

3. Apa peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaanperencanaan pembangunan infrastruktur publik di DesaPantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain, yaitu :

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam hal kepenulisan dan analisis khususnya yang berfokus pada kajian implementasi perencanaan dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik.
2. Bagi Masyarakat

   Untuk memberikan uraian bahwa implementasi perencanan dan partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi dan mempermudah proses

pembangunan infrastruktur desa.

3. Bagi Pemerintah Desa Pantai Cermin

   Untuk memberikan usulan bahwa peran pemerintah juga penting dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa.

4. Bagi Akademisi

   Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi pihak lain dan sebagai landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

1. Desa

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni "*swadesi*" yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.[1]

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa: "Yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara KesatuanRepublik Indonesia".[2]

Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyar dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan pedesaan didefinisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatanutama pertanian, termasuk pengelolaan

---

[1]Soetardjo kartohadikoesoemo, *Desa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)*

[2]Undang-Undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Otonomi Daerah, h.14

sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.[3]

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dandihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[4]

Dalam definisi klasik, secara ekonomi kawasan pedesaan dikategorikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian sedangkan kawasan perkotaan dikategorikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama di sektor jasa dan perdagangan.[5]

Munculnya kawasan pedesaan dengan perekonomian yang ditopang oleh kegiatan industri kecil seperti kerajinan, pariwisata, definisi tersebut dirasa belum dapat mewakili keseluruhan tipologi kawasan pedesaan. Oleh karenanya muncul istilah-istilah seperti desa-kota yang berusaha mendefinisikan kawasan-kawasan pedesaan yang dianggap memiliki ciri-ciri perkotaan baik secara fisik maupun sosial dan ekonomi.[6]

Suhardjo mendefinisikan kawasan pedesaan sebagai kesatuan wilayah sosial/budaya, atau kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk menjelaskan kawasan pedesaan yang bisa akibat mempunyai kemiripan dengan sifat kota. Kawasan tersebut sebagai kawasan desa-kota atau kawasan pedesaan yang mempunyai ciri kota, yang biasanya terdapat di kawasan tepi area. Sedangkan dalam Kamus Tata

---

[3]Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang

[4]A.J. Suhardjo. *Geografi Pedesaan Sebuah Antologi*, (Yogyakarta: IdeAs Media, 2008), h.76

[5]Ibid, h.79

[6]Ibid, h.84

Ruang 2008, desa-kota didefinisikan sebagai desa yang mata pencahariannya mirip dengan di kota, termasuk gaya hidup dan gaya perumahannya. Menggunakan pendekatan batasan fungsional, kawasan tersebut dicirikan dengan kesamaan fisik (perumahan) dan sosial budaya (mata pencaharian dan gaya hidup).[7]

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap kawasan definisi kawasan pedesaan yang akan diangkat dalam penelitian. Kawasan pedesaan dapat diartikan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan batasan administratif dan batasan fungsional sebagai berikut:

a. Dalam batasan administratif, kawasan pedesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah administratif yang telah ditetapkan secara hukum.
b. Dalam pendekatan fungsional, kawasan pedesaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan wilayah fungsional yang memiliki ciri fisikdan sosial budaya tertentu dengan kegiatan ekonomi pertanian dan/atau pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam. Sehingga dalam definisi ini, kawasan sub-urban atau fringe area dengan ciri fisik perkotaan bukan dianggap sebagai kawasan pedesaan.

Maka berdasarkan pendekatan tersebut, Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat baik secara administratif maupun fungsional dapat dikategorikan sebagai kawasan pedesaan.

2. Perencanaan

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Pengertian perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli dan belum

[7]Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, “Kamus TataRuang”. 1997

terdapat batasan yang dapat diterima secara umum. Pengertian atau batasan perencanaan tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Siagian, Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.[8]
b. Menurut Handayaningrat, Perencanaan yaitu berbagai proses untuk dapat mempersiapkakn seperangkat keputusan tentang kegiatan-kegiatan pada masa yg akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melaluill penggunaan saran yg tersedia.[9]
c. Menurut Erly Suandi, Perencanaan yakni suatu proses penentuan tujuan organisasi serta yang kemudian menyajikan nya itu dengan jelas taktik-taktik, strategi-strategi, serta juga operasi yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi dengan secara menyeluruh.[10]
d. Menurut Robbins and Coulter, Perencanaan sebagai sebuah proses yang di tandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintregasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi.[11]

Dari pengertian di atas dapat di uraikan beberapa komponen penting yakni tujuan apa yang hendak di capai, kegiatan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu (kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang

---

[8]Wrihatnolo dan Rand R dan Riant Nugroho, *Manajemen Pembangunan Indonesia: sebuah pengantar dan panduan,* (Jakarta, Media Komputindo) h.40

[9]https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-perencanaan-menurut-para-ahli/ (Diakses Pada 3 Februari 2021)

[10]*Ibid*

[11]Sunarji Harahap, *Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 58-59

direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk masa depan, bukanlah hipotesis yang di buat tanpa perhitungan. Hipotesis dalam perencanaan selalu didasarkan atas data-data dan perkiraan yang telah tercapai, dan juga memperhitungkan sumber daya yang ada dan akan dapat dihimpun. Dengan demikian perencanaan berfungsi sebagai pedoman sekaligus ukuran untuk menentukan perencanaan berikutnya. Ada beberapa unsur-unsur dan tipe-tipe perencanaan sebagai berikut :

a. Unsur-unsur perencanaan, diantaranya:[12]

   1) Sifat rencana itu sendiri sebagai dasar pelaksanaan nya sudah mengandung ciri-ciri yang berorientasi pada pelaksanaan, dalam arti memungkinkan untuk pelaksanaannya dan perencanaan tersebut sudah diperhatikan kapasitas administrative dalam pelaksanaannya.

   2) Proses-proses perencanaan tetap mengandung unsur kontinuitas dan fleksibilitas, oleh karena itu harus dilakukan terus-menerus reformulasi rencana dan reimplementasi dalam pelaksanaannya.

   3) Mengusahakan perencanaan dapat seoperasional mungkin.

   4) Adanya sistem pengendalian pelaksanaan pembangunan yang mengusahakan keserasian antara pelaksana dan perencana.

   5) Diperlukan adanya sistem pelaporan dan evaluasi dalam proses perencanaan.

b. Tipe-tipe perencanaan, di antaranya:[13]

   1) Maksud atau misi. Maksudnya ialah tujuan luas yang berlaku bukan hanya bagi organisasi tertentu, tetapi berlaku bagi semua organisasi sejenis. Misi suatu organisasi adalah tujuan khusus yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain yang

---

[12]Nurlela Ketaren, *Bahan Kuliah Azas-Azas Manajemen,* (Medan, 2006) h. 70

[13]*Ibid*

sejenis.

2) Strategi, adalah penentuan terhadap tujuan utama berjangka panjang dan sasaran dari suatu perusahaan dan pemilihan cara-cara bertindak dan pengalokasian sumber-sumber yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
3) Kebijaksanaan, adalah pernyataan-pernyataan umum yang merupakan pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam pengambilan keputusan.
4) Prosedur, merupakan rencana dalam arti kata merupakan metode yang biasa dipakai dalam menangani kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
5) Peraturan, adalah tindakan-tindakan yang dituntut untuk dilakukan dan dipilih dalam menangani kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
6) Program, adalah gabungan dari tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas-tugas, langkah-langkah yang akan diambil, sumber-sumber yang akan digunakan dan unsur-unsur lain yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran belanja.
7) Anggaran, adalah suatu rencana yang menggambarkan hasil yang diharapkan dan dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka-angka.

a. Konsep Perencanaan Daerah

Kemudian hubungannya dengan perencanaan daerah, apakah perencanaan daerah adalah perencanaan yang dibuat daerah, ataukah meupakan dokumen mengenai perencanaan (pembangunan) suatu daerah dan bagaimanakah posisi pembangunan nasional?

Menurut Abe pengertian perencanaan daerah ada 2 (dua) macam yaitu:

1) Perencanaan daerah sebagai suatu bentuk perencanaan pembangunan yang merupakan implementasi atau penjabaran dari

perencanaan pusat (nasional). Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan : (1) perencanaan daerah adalah bagian dari perencanaan pusat, dan (2) perencanaan daerah adalah penjelasan mengenai rencana nasional yang diselenggarakan didaerah. Proses penyusunannya bisa dilakukan melalui topdown atau buttom up.

2) Perencanaan daerah sebagai suatu hasil pergulatan daerah dalam merumuskan kepentingan lokal. Dalam soal ini terjadi dua kemungkinan (1) perencanaan daerah sebagai rumusan murni kepentingan daerah tanpa mengindahkan koridor pusat, (2) perencanaan daerah tidak lebih sebagai kesempatan yang diberikan pusat untuk diisi oleh daerah.

b. Konsep Perencanaan Pembangunan

Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang bentuk nya yaitu perencanaan dan pembangunan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembangunan adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa Negara dan Pemerintah Modernitas dalam rangka Pembinaaan Bangsa.

Pemerintah telah menyusun sistem perencanaan pembangunan nasional terpadu menyeluruh sistematik yang tanggap terhadap perkembangan zaman, yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara

negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.[14]

Suatu perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran serta terlaksana dan bermanfaat hasilnya dengan baik bila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga kiranya merupakan keharusan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penyusunan rencana pembangunan itu sendiri. Yang mana perencanaan itu sendiri bersumber dari penggalian dan perumusan masalah yang terdapat dimasyarakat.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perencanaan adalah suatu penerapan yang dilakukan atas dasar rencana yang telah disusun secara rinci sebelumnya. Implementasi dapat dilaksanakan saat rencana telah dirancang secara rinci dan matang

3. Implementasi Perencanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi adalah, "tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". [15] Sedangkan Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa "Mengkaji masalah implementasi berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses mengesahkan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikannya maupun yang

---

[14]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 TentangSistem Perencanaan Pembangunan

[15]Abdul Wahab Solichin, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara,* (Malang: Bumi Aksara, 1990) h.51

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu".[16]

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, dapat dirumuskan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Menurut Casley dan Kumar untuk mengimplementasikan kebijakan, ada beberapa metode yang di tawarkan dengan enam langkah sebagai berikut:[17]

a. Identifikasi masalah, batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan pisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya. Rumuskan sebuah hipotesis.
b. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut, kumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis.
c. Kajilah hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisislah situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pertimbangkan berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen. Hindari diskusi yang tidak realisasi.
d. Kembangkan solusi-solusi alternative.

---

[16]Fadillah Putra, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik,* (Yogyakarta,2003) h.84

[17]Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) h.16

e. Perkirakan solusi yang paling banyak, tentukan kriteria dengan jelas dan terapkan (*applicable*) untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif.
f. Pantaulah terus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Sumarto bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberatif,* di mana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi.[18]

Menurut Verhange, kegiatan partisipasi merupakan suatu bentuk khususdari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian wewenang, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki masyarakat mengenai:[19]

a. Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki.
b. Kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
c. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangsi yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Konsep partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi

---

[18]Fathurrahman Fadil,*"Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah",*Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. II No. 2, Desember 2013. h. 254.

[19]Aprilia Theresia dan Krishna, *"Pembangunan Berbasis Masyarakat."* (Bandung: Alfabeth, 2015) h.197

sebagai tindakan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.[20]

Sedangkan pengertian masyarakat menurut Robert Mac Iver adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold J. Laski masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama danbekerjasama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama.[21]

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan tentang masyarakat, yaitu merupakan sebuah kelompok manusia sebagai satukesatuan dan juga merupakan sebuah sistem yang menimbulkan kebiasaan dan kebudayaan di mana setiap orang merasa terikat satu dengan yang lainnya mencakup semua kebutuhannya baik dalam suatu kelompok maupun individudi dalam suatu wilayah tersebut.

a. Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d) partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.[22]

Dalam konteks pembangunan partisipasi masyarakat adalah

---

[20]Mardikanto, *Cooperste Social Responbility Tanggung Jawab Sosial Koorporas*, (Bandung:Alfabeth, 2014), h.56

[21]Mariam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* (Jakarta. PT Gramedia. 1982), h.35-36

[22]Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat local. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek.[23]

Partisipasi masyarakat juga disebutkan sebagai pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaandan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.[24]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 1ayat 41 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ada 3 (Tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu:[25]

1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

---

[23]Fathurrahman Fadil,*"Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah",*Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol. II No. 2, Desember 2013. h.255

[24]*Ibid*

[25]*Ibid*

perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyairasa memiliki terhadap proyek tertentu.

3) Adanya suatu tanggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan didaerah mereka.

Menurut Santosa dan Heroepoetri, manfaat adanya partisipasi dalam masyarakat adalah:

1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab.
2) Meningkatkan proses belajar.
3) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana Pemerintah
4) Menciptakan kesadaran politik.
5) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
6) Menjadi sumber dari informasi yang berguna.

b. Bentuk Partisipasi

Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan. *Pertama,* kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap suatu program untukmasyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam implementasi program serta menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari program pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, di mana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka.

Kedua, meningkatkan kontrol terhadap sumber daya dan mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkutpengambilan keputusan

pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.[26]

Partisipasi masyarakat juga terefleksikan dalam berbagai bentuk, rusidi mengatakan ada empat dimensi dalam berpartisipasi:[27]

1) Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
2) Sumbangan materi (dana, barang dan alat)
3) Sumbangan tenaga (bekerja atau member kerja)
4) Memanfaatkan dan melaksanakan pelayanan pembangunan.

Bentuk partisipasi yang ditunjukkan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Hobley mengemukakanpartisipasi dalam tujuh jenis yaitu:[28]

1) Partisipasi pasif, informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional diluar kelompok sasaran.
2) Partisipasi informatif, masyarakat tidak diberi kesempatanuntuk terlibat dalam kegiatan mempengaruhi.
3) Partisipasi Masyarakat dengan cara berkonsultasi.
4) Konsultatif, tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.
5) Partisipasi fungsional, masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek.
6) Partisipasi interaktif, mayarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatankelembagaan.
7) *Zelf mobilization* (Mandiri), mayarakat memegang kendalipemanfaatan sumber daya yang ada.

Menurut Raharjo, partisipasi dibedakan berdasarkan derajat

---

[26]*Ibid*

[27]*Ibid*, h.256.

[28]Aprilia Theresia dan Krishna, *Pembangunan Berbasis Masyarakat.* (Bandung, Alfabeta: 2015) h.205-206

kesukarelaannya, yaitu sebagai berikut:[29]

1) Partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang terbentuk dan tumbuh karena motivasi intrinsicberupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinan sendiri tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari bujukan yang dilakukan oleh pihak lain (baik individu maupun lembaga masyarakat).
2) Partisipasi terinduksi, yaitu partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsic, (berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartispasi. Motivasi ekstrinsik tersebut bisa berasal dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun lembaga sosial setempat atau individu.
3) Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya masyarakat pada umumnya.
4) Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu partisipasi yang dilakukan karena ketakutan kehilangan ststus sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksankan.
5) Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan.

Sementara Cohen dan Uphoff menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu:[30]

1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation indecision*

---

[29]Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademisi, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat,* (Bandung, Alfabeta: 2014) h.200

[30]Fathurrahman Fadil,*"Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah",*Jurnal Ilmu Politikdan Pemerintahan Lokal, Vol. II No. 2, Desember 2013. h. 256.

making)

2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation inimplementation*)
3) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)
4) Partisipasi dalam menerima manfaat/hasil (*participation inbenefits*)

Partisipasi penuh dapat terwujud jika struktur kelembagaan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dan memjutuskan persoalan mereka sendiri sehari-sehari dan refresentasi masyarakat yang terwakili secara proporsional di dalam setiap proses pengambilan kebijakan atas nama kepentingan bersama. Oleh karenanya, partisipasi masyarakat harus didasarkan pada pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi hasil. Sementara empat aspek yangmenjadi indikasi terbangunnya partisipasi, yakni:[31]

1) Informasi atau akses lainnya.
2) Inisiatif (*voice*/suara) dan apresiasi warga (masukan)
3) Mekanisme pengambilan keputusan
4) kontrol pengawasan.

Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut:[32]

1) Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secarasukarela bukan karena paksanaan atau ancaman.
2) Meningkatkan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis, dan non ekonomis).
3) Menunjukan adanya kesempatan yang diberikan kepadamasyarakat untuk berpartisipasi

---

[31]Totok Mardikanto, *Cooperative Social Responbility,* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.11

[32]*Ibid*

Proses pembangunan perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui "peran pemerintah bersama masyarakat" melalui partisipasi dengan nmemperhatikan kondisi ekonomi, perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada, perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional atau globalisasi. Konsep perencanaan bersifat *top down* yang telah menciptakan kegegalan pembangunan harus diganti dengan konsep perencanaan pembangunan yang berasal dari bawah (*bottom-up planning*) dengan partisipasi aktif dari masyarakat.[33] Ada beberapa keuntungan yang dapat kita harapkan dari adanya suatu penerapan pendekatan partsipatif, yakni:[34]

1) Masyarakat akan lebih memiliki rasa tanggungjawab yanglebih tinggi terutama dalam hal memelihara dan menjaga apa yang telah dibangun bersama.
2) Semangat akan pembangunan akan lebih memaknai proses pembangunan itu sendiri secara holistic sebagai konsekuensi adanya kebersamaan di dalam membangun, baik dalam hal merencanakan maupun mengambil keputusan.
3) Ketidakefisienan seperti adanya program yang tumpang tindih di dalam proses pembangunan dapat dihindari sehinggapenghematan pada penganggaran pembangunan pun dapatdilakukan.

Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses perencanaan pembangunan yang baik dan benar.[35] Untuk dapat mewujudkan partisipasi masyarakat agar dapat bedaya guna, sangat

---

[33]Adisasmita dan Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) h.35

[34]Rahardjo Adisasmita. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan.* (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006) h.35

[35]Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif,* (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005) h.91

dibutuhkan kebebasan, kesempatan dan ruang gerak yang tersusun dalam empat tingkatan, yaitu:[36]

1) Partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan keijakan pembangunan.
2) Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-program infrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu, kepentingan-kepentingan dan saran-saran mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.
3) Partisipasi yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen perlu memperoleh stimulant dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi pembangunan yang kurang memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.
4) Partisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial dalamrangka tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan beberapa uraian dari pengertian partisipasi tersebut, dapat dilihat dari perkembangannya partisipasi tidak lagi hanya diasumsikan sebagai pemberi kontribusi yang hanya berupa uang atau sarana masyarakat yang di berikan secara sukarela, tetapi dalam hal ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan potensi masyarakat yang di dalam terdapat unsur pelibatan masyarakat dalam informasi, pengambilan keputusan dan control serta pengawasan terhadap sebuah kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat itu sendiri dalm hal pembangunan dan peningkatan ekonomi di daerah tersebut.

---

[36]Arif, Syaiful, *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, (Malang, Averroes Press, 2006) h.150-151

5. Pembangunan

Menurut Rogers dan Shoemaker, Pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial, yang mana terdapat berbagai ide baru yang diperkenalkan di sebuah sistem sosial yang bertujuan agar bisa menghasilkan pendapatan per kapita dan level kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan metode produksi yang lebih canggih dan organisasi sosial yang lebih terarah.[37]

Sedangkan menurut Mohammad Ali, Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia.[38]

Pembangunan yaitu proses perubahan yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau ekstenal.

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran (Pengangguran merupakan salah satu tolak ukur sosio ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan pemerintah di suatu daerah. Banyak sekali masalah-masalah sosial yang bersifat negatif timbul akibat meningkatnya pengangguran.) [39] , dan kesenjangan ekonomi.

---

[37]http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/ (Diakses pada 21 Januari 2021)

[38]*Ibid*

[39]Imsar, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016*, Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018, h. 148.

Penduduk, modal (kapitalisme) dan kewirausahaan merupakan faktor penting dalam pembangunan.[40]

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong.[41]

Pembangunan masyarakat desa meliputi dua unsur, yaitu ikut serta penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik dan lainnya sehingga memajukan inisiatif mereka sendiri dan saling membantu.[42]

Arthur Lewis membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut, sehingga pemerintah Indonesia perlu memberikan kebijakan untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, hal ini juga dapat membangun Indonesia lebih baik melalui peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.[43]

Pembangunan masyarakat desa adalah suatu proses di mana orang-orangdisitu bersama-sama dengan pejabat-pejabat pemerintahan berusaha

---

[40]Isnaini Harahap, "Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner", (Medan: Perdana Publishing, 2018) h.26

[41]Irwan M Suparmoko, Ekonomi Pembangunan Desa, (Jakarta: Duta Aksara, 2002) h. 12.

[42]*Ibid*, h. 14.

[43]Fahrul Ridha, "Analisis Pengelolaan Dana Desa", *At-tawasuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2. 2019. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. h. 255

untuk memperbaiki keadaan perekonomian sosial dan kebudayaan dalam masyarakat yang bersangkutan mengintegrasi masyarakat ini dalam kehidupan Bangsa dan Negara.[44]

Pembangunan bertujuan untuk memberikan kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendri dan dengan adanya peran partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hadil dari pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah tersebut.[45]

Oleh karena itu pembangunan Infrastruktur Desa dalam seluruh prosesnya mulai dari perecanaan, pengorganisasian, implementasi dan tindak lanjutnya, harus diorientasikan pada pengikutsertaan masyarakat, begitupun bentuk-bentuk organisasi pembagunan desa harus mengunakan sistem dan prosedur yang selalu memperhitungkan dan memberikan peluang bagi terselenggaranya partisipasi masyarakat secara maksimal.

Keterlibatan/pelibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan mutlak adanya, karena tanpa itu maka program pembangunan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan. Yakni pembangunan yang berkelanjutan dan dapat mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan perlu benar-benar diperhitungkan.

Salah satu pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam Islam akan menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan hal seperti ini maka akan terus dapat memperbaiki taraf hidupnya yang ke lebih baik. Islam memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dalam kitab suci Al-

---

[44]*Ibid*

[45]*Ibid* h.257

Qur’an dalam Surah Ar-Ra’d Ayat 11:

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ

مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinyabergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”[46]

Berdasarkan ayat di atas, yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang mana melalui pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumber daya mereka. Sehingga dengan mereka dapat mengelola dan membentuk penggalian kemampuan pribadi,kreatifitas, kompetensi dan daya pikir dapat merubah kehidupannya pula dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dapat memiliki motivasi. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi.

Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi

[46]Q.S. Ar-Ra’d (13): 11.

permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Pembangunan yang mendukung prinsip pemerataan, akan menghasilkan pembangunan yang adil, makmur serta sejahtera bagi masyarakatnya. Pembangunan infrastruktur juga bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat.

Mengenai defenisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, riyadi mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada satu kesepakatan bahwa Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat pembangunan itu.[47]

Pembangunan adalah suatu usaha atauproses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Sesuai dengan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2014, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efesien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:[48]

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, dan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana,penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam

[47]Riyady & Dedy Supriyady Bratakusumah, *Perencanaan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah,* (Jakarta: Gramedia Utama 2004) h. 14

[48]Kodoatie, R, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), h. 54-55.

perencanaanpembangunan.

e. Menjamin tercpainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif dan adil.

Konsep pembangunan Maltus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Melainkan memerlukan berbagai usaha yang konsiseten dari pihak rakyat. Dia tidak memberikan gambaran mengenai adanya gerakan menuju keadaan perubahan mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Jadi menurut Maltus proses pembangunan adalah suatu proses naik-turunya aktivitas ekonomi (pertumbuhan ekonomi) lebih dari pada lancar tidaknya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah tersebut.[49]

Menurut Maltus kaitannya pertumbuhan ekonomi saja tidak cukupuntuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi adalah akibat proses pembangunan. Menurut Maltus: ”pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Maltus membagi perekonomian menjadi sektor pertanian dan industri. Kemajuan teknologi dari dua sector tersebutlah yang dapat membawa kepada pembangunan ekonomi.[50]

Menurut teori Maltus penyebab utama keterbelakangan rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah. Pemerintahan daerah untuk pembangunan harus memaksimalkan produksi disektor pertanian dan industri karena dua sektor itulah yang membawa kepada pembangunan ekonomi disuatu daerah. Selain itu terdapat faktor nonekonomi seperti disektor kesehatan, pendidikan standar moral, kebiasaaan pekerja keras, Administrasi yang baik dan hokum yang efesien yang dapat membantu meningkatkan produksi

---

[49]Thomas Robert Maltus, *“The Essay on The Principle of Population,* “hhtp:/www.ajarekonomi.com”

[50]*Ibid*

didua sektor tersebut. Jadifaktor ekonomi dan nonekonomi ini dua-duanya dapat membawa kearah pertumbuhan ekonomi.

Menurut Schumpeter pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus dalam saluran arus perubahan tersebut, gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Perubahan dalam kehidupan ekonomi yang spontan dan terputus-putus ini tidak jauh dari luar pertumbuhan ekonomi, akan tetapi timbul atas inisiatif perekonomian itu sendiri.[51]

Menurut Todaro pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimendial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.[52]

Tujuan Pembangunan ada dua tahap. “pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan–kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.[53]

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan.

Dalam Islam, pembangunan ekonomi bersifat material dan spiritual.

---

[51]Dwi Sosilawati, *Pengantar Ekonomi,* (Malang: UniversitasMuhammadiyah, 2011) h. 115.

[52]Michael R. Todaro Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi,* Edisi Kesebelas (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001) h. 63

[53]*Ibid* h. 71.

Yang mencakup sumber daya manusia (SDM), sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan lainnya. Dampak pembangunan dalam Islam adalah menyeluruh sebagaimana konsep Islam sebagai agama yang menyeluruh. Bukan hanya ekonomi yang bersifat material tetapi juga pembangunan nonmaterial yang bersifat spiritual, akhlak, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Ada lima utama pembangunan dalam Islam, yaitu:

a. Konsep pembangunan berlandaskan tauhid, khalifah dan tazkiyah.
b. Fokus utama pembangunan adalah manusia sebagai subjek danobjek pembangunan guna mencapaik kesejahteraan.
c. Fungsi dan peran pemerintah (daerah).
d. Skala waktu pembangunan meliputi dunia dan akhirat.

Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.[54]

Manusia berada dalam kapasitas kolektifnya, seperti ummah (komunitas) dan qawn (golongan) sebuah kolektifitas mempunyai tanggung jawab penuh atas nasib diri sendiri. Demikianlah maka anjuran untuk tolong menolong dalam kebajikan (al-birr) dapat ditafsirkan bahwa sebuah kolektifitas diserukanuntuk merekayasa kehidupannya, tidak lepas begitu saja. Kebajikan (al-birr) yang tertinggi itu dihubungkan dengan masalah ekonomi dapat disimpulkan dalam surah Ali-‘Imran [3]: 92, sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

[54]Fadlan, “Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam: Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera”, *Al-Ihkam,* Vol. 5, No. 2, 2010. H.264.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali- ‘Imran [3]: 92).[55]

Hal tersebut merupakan pengakuan bahwa kepentingan ekonomilah yang menjadi ukuran kebajikan sosial. Karena itu, rekayasa sosial atas ekonomi adalah suatu kebajikan (al-birr). Bahwa masalah ekonomi mendapat perhatian utama, terutama bila dihubungkan dengan kemiskinan.

6. Infrastruktur Publik

Infrastrutur merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan fasilitas yang sengaja dibuat untuk mendukung aktifitas kehidupan manusia. Infrastrukur biasanya sengaja dibangun untuk bisa membantu dan mempermudah suatu kegiatan tertentu seperti transportasi, pendataan penduduk dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Infrastruktur, merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kubutuhan sosial maupun kubutuhan ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dalam hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastrruktur yang menopang antara system social dan system ekonomi.

Sedangkan menurut Fajar Suryanto, infrastruktur ialah suatu rangkaian yang terdiri atas adanya berbagai bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, di mana jalan merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti:

[55]Q.S. Ali-‘Imran (3): 92

Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur memang diperlukan secara mendalam dan aktif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat.

Robert J. Kodoatie mengatakan "Infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, di mana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan."

Sedangkan Pengertian Publik adalah sekeolompok orang (Individu) yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia (sosiologis). Istilah public diserap dari bahasa latin, *Publicus* yang berarti untuk orang *for populicus. Populicus* berasal dari kata *populus* yang berarti orang (*people*).[56]

Menurut Herbert Blumer, sekelompok orang yang dihadapkan pada suatupermasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara emecahan persoalan tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu merupakan public.[57] Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Infrastruktur Publik merupakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan suatu negara untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privatsebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya

---

[56]https://www.literasipublik.com/pengertian-publik (Diakses pada 13 Januari 2021)

[57]*Ibid*

sehingga dapatmeningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Pembangunan infrastruktur tentu berdasarkan atas sebuah gagasan, yang di mana memiliki maksud dan tujuan yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Keberhasilan sebuah pembangunan infrastruktur yaitu dapat diukur dari sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Hubungan fungsi antara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain :

a. Obyek Rahasia: gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi militer,instansi polisi, BIN.
b. Obyek vital: pusat & jaringan listrik, pusat & jaringan komunikasi, pusat perdagangan, pusat eksplorasi, pusat konsentrasi masyarakat, bendungan, sarana & prasarana transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri.
c. Obyek strategis: pabrik alat tempur militer, pabrik obat-obatan, radar pengamat, garis perbatasan.
d. Obyek umum: bangunan fasos & fasum (pendidikan, peribadatan, tempat hiburan, taman, jalur hijau dll).

Kesediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyrakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan. Gigg membagi infrastruktur dalam 13 katagori yaitu:[58]

---

[58]RJ Koodatie, *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h.60

a. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan air, tranmisi dan distribusi, fasilitas pengolaan air.
b. Sistem pengolaan air limbah: pengumpulan, pengelolaan, pembuangandan daur ulang.
c. Fasilitas pengelolaan limbah.
d. Fasilitas pengendapan banjir.
e. Fasilitas navigasi dan transportasi.
f. System transit public.
g. System kelistrikan.
h. Fasilitas gas alam.
i. Gedung public, kantor, sekolah, rumah sakit.
j. Fasilitas perumahan public.
k. Taman kota sebagai daerah resapan, tempat bermain termasuk stadion.
l. Komuniksi

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakat perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Keterpaduan pembangunan desa, di mana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
b. Keberpihakan, di mana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
c. Otonomi dan desentralisasi, di mana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam peroses

perencanaa, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Julpian Harahap dan M. Rizki Nasution, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Program SANIMAS (IsDB) Di Kelurahan Tanjung Gusta Kota Medan".[59] penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan observasi dan wawancara untuk mendapatkan hasil, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BKM dan KSM dalam partisipasi sosialisasi masyarakat terhadap Sanimas dilakukan dengan baik. Masyarakat juga masih bergantung pada Tanaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagai pembimbing dalam melaksanakan program. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul "Analisis Implementasi Perencanaan Dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat" dalam Partisipasi Masyarakat yang terjadi di Desa Pantai Cermin masih sangat buruk. Kesadaran masyarakat dalam hal pembangunan masih sangat kurang. Masyarakat lebih bergantung pada Aparat Desa untuk melakukan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, daripada harus menyampaikan aspirasinya sendiri.
2. Atika Dzulkhijiana, "Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kecamatan Banyu biru Kabupaten Semarang". [60] Metode yang digunakan Analisis Statistik Deskriptif, dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa persepsi

[59]Julpian Harahap dan M. Rizki Nasution, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Program SANIMAS (IsDB) Di Kelurahan Tanjung Gusta Kota Medan", Tansiq, Vol.3 No.1, Januari-Juni 2020, h.2

[60]Atika Dzulkhijiana, "Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kecamatan Banyu biru Kabupaten Semarang", [Skripsi], Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2015

masyarakat sebelum dan sesudah program PPIP dinilai bagusyaitu terhadap perkembangan desa dan tingkat partisipasi masyarakat dinilai cukup. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul "Analisis Implementasi Perencanaan Dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat" yang menjadi faktor penghambat Implementasi Perencanaan dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur Publik yaitu rendahnya sumber daya manusia dalam memahami aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan perencanaan pekerjaan pembangunan.

3. Pislawati Alfiaturrahman, "Perencanaan Pembangunan Desa Di DesaBagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalauan".[61] Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembangunan proses perencanaan belum dilaksankandengan baik didesa Bagan Limau, di mana beberapa tahap belum dilaksanakan, termasuk tahap persiapan dan tahap diskusi kegiatan/prioritas kegiatan yang akan diserahkan ke tingkat kabupaten musrenbang. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul "Analisis Implementasi Perencanaan Dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat" pada umumnya implementasi atau pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Pantai Cermin KecamatanTanjung Pura Langkat belum efektif masih banyak yang belum terealisasikan.
4. Abdur Rahman dan Rosmita, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indra Giri Hilir".[62] Metode yang digunakan adalah metode

---

[61] Pislawati Alfiaturrahman, "Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalauan", dalam Jurnal Valuta, Vol.2 No.2, Oktober 2016, h.251

[62]Abdur Rahman dan Rosmita. "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indra Giri Hilir", dalam Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi, Vol.1 No.2, Mei 2019, h.57

Analisa Deskriptif Kualitatif, dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dikatakan tinggi hal ini dapat dilihat dari besarnya angka persentase yang diperoleh yaitu sebesar 80% (79,78) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan bahwa persentase pada interval 61%-80% dikategorikan tinggi terbukti dengan adanya masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi selalu hadir dan memberikan pendapat dan kritikan kepada pemerintah terhadap aktivitas pembangunan infrastruktur. Sedangkan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul "Analisis Implementasi Perencanaan Dan Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Publik Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat" Partisipatif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik masih sangat kurang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan dalam pembangunan infrastruktur publik di desa Pantai Cermin juga masih jauh dari harapan. Sehingga pembangunan infrastruktur publik didesa Pantai Cermin masih belum dapat secara efektif dilaksanakan.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka pemikiran adalah suatu kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran berisikan rangkaian penalaran peneliti untuk menjawab rumusan masalah dari hasil kajian pustaka. Kerangka pemikir ini bisa dikatakan kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang identifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh informasi yang bersumber pada bagian laporan ilmiah, hasil penelitian, jurnal penelitian, dan lain-lain.[63]

[63]Arfan Ikhsan, et. all, *Metodologi Penelitian Bisnis,* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 35.

Berikut merupakan kerangka berpikir pada penelitian ini yang dijelaskan pada bagan dibawah ini:

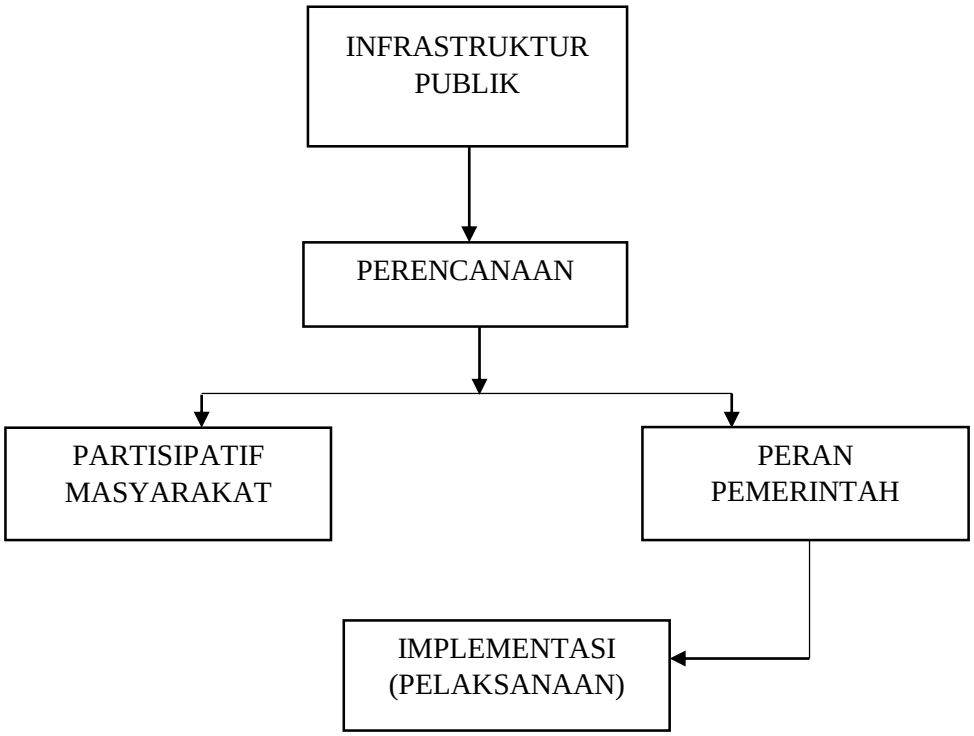

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari peta konseptual di atas dapat di jelaskan bahwa untuk mewujudkan atau melaksanakan pembangunan infrastruktur publik yg harus di lakukan adalah perencanaan dengan sebuah perencanaan maka hasil yang akan di proleh akan memuaskan. Dalam melaksanakan sebuah perencanaan terkhusus perencanaan pembangunan maka di butuhkan nya partisipasi dari masyarakat dan juga peran pemerintah agar perencanaan sesuai dengan apa yg di butuhkan dan hasilnya dapat di rasakan dan di manfaatkan. Partisipasi dan peran pemerintah harus saling berdampingan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di musyawarahkan oleh masyarakat dan juga aparat pemerintah, pelaksanaan ini harus sesuai dengan yang sudah di rencanakan. Masyarakat dan juga pemerintah harus ikut andil dalam pelaksanaan pembangunan ini, agar tidak ada penyelewengan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. [1] Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu penelitian untuk mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang mas alah yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualiatatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. [2] Penelitian kualitatif memiliki ciri atau krakteristik yang membedakan dengan penelitian lainnya.[3]

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pantai Cermin Kecamatan TanjungPura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dan juga partisipasi

---

[1]Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2016), h.4.

[2]Arfan Ikhsan, et.all, *Metodologi Penelitian Bisnis,* (Bandung:Citapustaka Media, 2014), h. 35.

[3]Azhari Akmal Tarigan, dkk, Metodologi Penenlitian Ekonomi Islam, (La-Tansa Press, 2019) h. 19

masyarakat di Desa Pantai Cermin ini menurut peneliti masih sangat kurang maksimal sehingga pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak sesuai perencanaan dan tidak sesuai harapan masyarakat. Waktu penelitian dilaksanakan pada Oktober 2020 sampai Juli 2020.

Tabel 3.1

Rencana Waktu Penelitian dan Penulisan

No	Kegiatan	Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	Minggu XXXII	Minggu XXXV
1	Penulisan perbaikan dan seminar proposal	X					
2	Penelitian lapangan		X	X	X		
3	Penulisan laporan dan pembahasan			X	X		
4	Penyelesaian laporan penelitian					X	
5	Pendaftaran dan pelaksanan sidang						X

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu Kepala Desa, serta Masyarakat Desa Pantai Cermin yang pernah mengikuti kegiatan musrenbang.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli yang

khusus di kumpulkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan atau data tambahan sebagai pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari data musrenbang, data pembangunan yang sudah di realisasi dan buku administrasi Desa. Serta tulisan yang diterbitkan seperti buku-buku yang di karang oleh para dosen FEBI UINSU, jurnal , situs internet yang terpecaya yaitu literasi publik, dan catatan yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berikut:

1. Pengamatan (*Observation*)

Menurut Creswell menyatakan bahwa observasi merupakan sebuah proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh penelitisendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.[4]

Dimana peneliti meninjau langsung ke Desa Pantai Cermin serta meminta data responden untuk dapat di wawancarai secara langsung untuk mengetahui secara detail tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti kegiatan/pelaksanaan, partisipasi, dan hasil dari perencanaan pembangunan infrastruktur publik di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut Gorden, wawancara merupakan percakapan antar dua orang di mana salah satunya bertujuan untuk menggali informasi dan mendapatkan

[4]Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2013), h. 130

informasi untuk suatu tujuan tertentu.[5] Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dan partisipatif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam interview peneliti mewawancarai Pemerintah Desa atau Kepala Desa besertajajarannya serta Masyarakat Desa di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan denganfoto, dan penyimpanan foto.[6]

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data fakta berupa gambar ataudokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaanpartisipatif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah, jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisisdata adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.[7] Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitiankualitatif

---

[5]*Ibid,* h. 29.

[6]Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi,* (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 56.

[7]*Ibid,* h. 78.

mencakup reduksi data, *display* data (penyajian data) dan mengambil kesimpulan. Berikut merupakan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Reduksi data

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengambstrakan dan transpormasi data dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan. Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis sehingga lebih tajam.[8]

2. Penyajian data

   Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data berbentuk naratif yang diubah menjadi berbagai bentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi tersusun dalam satu bentuk yang padu. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan dapat menarik kesimpulan.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

   Setelah data disajikan yang juga dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi

---

[8]*Ibid,* h. 81.

selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh *team* untukmencapai *"inter-subjective consensus"* yakni persetujuan bersama agar lebih menjamin validitas atau *"confirmability"*.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pantai Cermin

1. Geografi

Desa Pantai Cermin merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Batas Wilayah dan kondisi umum Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat adalag sbagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Suka Maju dan Desa Pematang Cengal

Sebelah Selatan : Desa Muka Paya dan Desa Cempa

Sebelah Timur : Desa Sungai Wampu

Sebelah Barat : Desa Lalang dan Desa Pekubuan

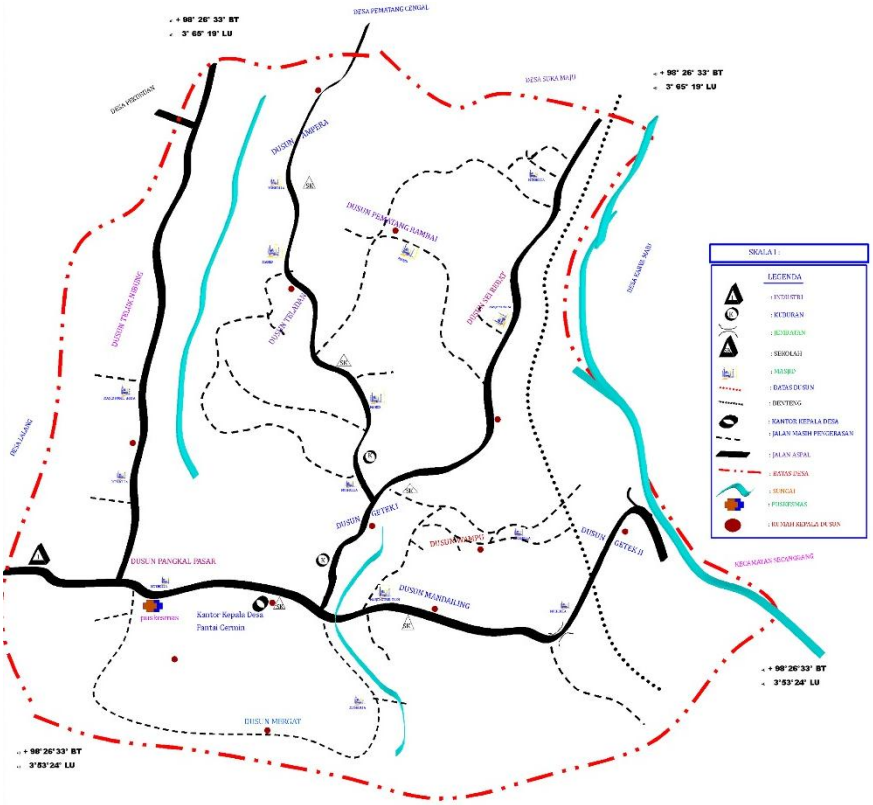

Gambar 4.1 Peta Desa Pantai Cermin

Tabel 4.1

Luas Wilayah Desa Pantai Cermin

Wilayah	Luas Wilayah (Ha)
Lahan Sawah	127 Ha
Lahan Ladang	68 Ha
Lahan Kebun	711 Ha
Hutan	5 Ha
Waduk,Danau	7 Ha
Dab Lain-lain	104 Ha

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

2. Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah 6.474 Jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3.280 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 3.194 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-laki	3.280
2	Perempuan	3.294
	Jumlah	**6.474**

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

		Jumlah Penduduk		
No	**Dusun**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1	Dusun T.Nibung	316	269	585
2	Dusun P.Pasar	225	210	435
3	Dusun Mandailing	282	218	500
4	Dusun Mergat	202	245	447
5	Dusun Getek II	164	126	290
6	Dusun Wampu	360	321	681
7	Dusun Getek I	160	163	323
8	Dusun Sei Rebat	496	489	982
9	Dusun P.Rambai	129	131	260
10	Dusun Teladan	291	298	389
11	Dusun Ampera	221	247	468
12	Dusun P.Sentang	434	477	911
Jumlah		**3.280**	**3.194**	**6.474**

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

Tabel 4.4

Usia Penduduk Berdasarkan Dusun

		Usia Penduduk		
No	**Dusun**	**Usia 0 – 17 Tahun**	**Usia 18 – 55 Tahun**	**Usia 55 - Keatas**
1	Dusun T.Nibung	147 Org	360 Org	70 Org
2	Dusun P.Pasar	123 org	302 Org	10 Org
3	Dusun Mandailing	120 Org	173 Org	27 Org
4	Dusun Mergat	73 Org	327 Org	47 Org

5	Dusun Getek II	67 Org	215 Org	8 Org
6	Dusun Wampu	201 Org	398 Org	81 Org
7	Dusun Getek I	108 Org	188 Org	27 Org
8	Dusun Sei Rebat	300 Org	573 org	102 Org
9	Dusun P.Rambai	96 Org	128 Org	36 Org
10	Dusun Teladan	312 Org	223 Org	54 Org
11	Dusun Ampera	238 Org	230 Org	87 org
12	Dusun P.Sentang	182 Org	169 Org	83 Org
Jumlah		**1.967 Org**	**3.286 Org**	**632 Org**

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

Tabel 4.5

Tingkat Pendidikan Umum Penduduk Berdasarkan Dusun

		LULUSAN PENDIDIKAN UMUM					
No	**Dusun**	**SD/ Sederajat**	**SMP/ Sederajat**	**SMA/ Sederajat**	**Akademi D1-D3**	**Sarjana S1**	**Sarjana S2**
1	Dusun T.Nibung	288 Org	120 Org	80 Org	5 Org	2 Org	-
2	Dusun P.Pasar	98 Org	56 Org	74 Org	5 Org	8 Org	-
3	Dusun Mandailing	200 Org	25 Org	80 Org	7 Org	3 Org	1 Org
4	Dusun Mergat	212 Org	57 Org	42 Org	-	11 Org	-
5	Dusun Getek II	27 Org	18 Org	15 Org	-	-	-
6	Dusun Wampu	50 Org	23 Org	15 Org	3 Org	-	-
7	Dusun Getek I	39 Org	11 Org	15 Org	-	-	-
8	Dusun Sei Rebat	140 Org	40 org	15 Org	1 Org	8 Org	-
9	Dusun P.Rambai	42 Org	78 Org	12 Org	-	2 Org	-
10	Dusun Teladan	161 Org	47 Org	16 Org	4 Org	10 Org	1 Org
11	Dusun Ampera	91 Org	47 Org	31 Org	2 Org	9 org	-
12	Dusun P.Sentang	315 Org	80 Org	50 Org	3 Org	3 Org	-

Jumlah	**1.663 Org**	**602 Org**	**445 Org**	**30 Org**	**56 Org**	**2 Org**

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

Tabel 4.6

Tingkat Pendidikan Penduduk Berdasarkan Dusun

		TIDAK LULUS DAN TIDAK SEKOLAH	
No	**Dusun**	**Tidak Lulus sekolah**	**Tidak Sekolah**
1	Dusun T.Nibung	140 Org	50 Org
2	Dusun P.Pasar	114 Org	54 Org
3	Dusun Mandailing	17 Org	53 Org
4	Dusun Mergat	21 Org	104 Org
5	Dusun Getek II	65 Org	81 Org
6	Dusun Wampu	10 Org	10 Org
7	Dusun Getek I	11 Org	3 Org
8	Dusun Sei Rebat	24 Org	51 Org
9	Dusun P.Rambai	-	6 Org
10	Dusun Teladan	13 Org	190 Org
11	Dusun Ampera	5 Org	4 Org
12	Dusun P.Sentang	6 Org	43 Org
Jumlah		**1.967 Org**	**424 Org**

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

Berdasarkan tabel-tabel di atas, menggambarkan bahwa Desa Air Hitam memiliki jumlah jumlah penduduk yang banyak. Dengan banyaknya jumlah penduduk di Desa Pantai Cermin maka semakin bermacam pula tingkat partisipasi masyarakat, utamanya dalam hal pembangunan.

Tabel 4.7

Sarana Tempat Ibadah Desa Pantai Cermin

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	7
2	Musholla	10
Total		**17**

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana tempat ibadah yang ada di Desa Pantai Cermin yaitu Mesjid dan Musholla, karena mayoritas masyarakat di Desa Pantai Cermin beragama Islam. Akan tetapi dengan banyaknya masyarakat yang beragama Islam, terdapat keinginan di tengah masyarakat yakni adanya pembangunan masjid dan musholla lainnya yang berada di Desa Pantai Cermin. Hal tersebut menjadi harapan besar masyarakat mengingat hanya terdapat 7 mesjid dan 10 musholla yang berada di desa.

3. Mata Pencaharian Pokok

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pantai Cermin dapat terindentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : PNS, TNI/Polri, BUMN, Wiraswasta, Petani, Buruh Tani, Nelayan, Peternak, Jasa, Pengrajin, Pekerja Seni.

Tabel 4.8

Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	27
2	TNI/Polri	8
3	BUMN	4
4	Wiraswasta	1.186
5	Petani	871
6	Buruh Tani	279

7	Nelayan	73
8	Peternak	93
9	Jasa	44
10	Pengrajin	28
11	Pekerja Seni	1

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin, 2021

4. Pemerintah Desa Pantai Cermin
   a. Personil
      1) Kepala Desa
         a. Nama : KOMERI EDI
         b. Pendidikan Terakhir : Paket C
         c. Pelatihan Yang Pernah di ikuti : Bimtek Aparatur Desa
         d. Jenis Kelamin : Laki- laki

      2) Sekertaris Desa
         a. Nama : ARBAIN
         b. Pendidikan Terakhir : S L T A
         c. Pelatihan yang Pernah diikuti : Bimtek Aparatur Desa
         d. Jenis Kelamain : Laki-laki

      3) Ketua BPD
         a. Nama : H.M DAHLAN
         b. Pendidikan Terakhir : S L T A
         c. Pelatihan yang pernah diikuti : BIMTEK BPD
         d. Jenis Kelamin : Laki-laki

   b. Data Umum
      1) Tipologi Desa / Kelurahan adalah Perladangan, Persawahan, Perkebunan
      2) Klasifikasi Desa adalah SWASEMBADA

3) Komuditas Unggulan Berdasarkan Luas tanam adalah Sawit dan Jambu Madu
4) Komuditas Unggulan Berdasarkan Ekonomi adalah Gula Aren, Jambu Madu

c. Visi dan Misi

1) Visi

"Terwujudnya Desa Pantai Cermin yang lebih maju, cerdas, sejahtera serta mandiri yang berbasis pada sector Pertanian, Perdagangan, dan Perkebunan dengan berdasarkan Iman dan Taqwa".

2) Misi

a. Meningkatkan pelayanan Masyarakat dan Peningkatan Profesionalisma Perangkat Desa.
b. Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat Desa.
c. Membangun kondisi daerah yang aman, tertib dan damai di lingkungan desa dengan menegakkan Supremasi hukum dan HAM.
d. Meningatkan ketersedi an infrastruktur.
e. Meningkatkan ekonomi Kerakyatan yang berdaya saing.
f. Menerapkan Konsep Pembangunan berkelanjutan.

d. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pantai Cermin

B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara kepada kepala Desa Pantai Cermin yaitu Bapak Komeri Edi menyatakan ada beberapa bagian pengimplementasi perencanaan pembangunan dan juga hal yang mempengaruhi tingkat partisipatifnya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur.

a. Waktu dan cara pelaksanaan perencanaan pembangunana infrastruktur

Pelaksanaan perencanaan infrastruktur sudah dilakukan sejak lama tetapi pada saat ini dilakukan perencanaanya setiap akhir tahun dengan mengadakan musyawarah bersama masyarakat sekitar sehingga saat dana yang di turunkan oleh pemerintah pusat dapat dipergunakan sesuai dengan hasil musyawarah yang akan dilaksanakan pada awal tahun, walaupun pada pelaksanaannya tidak selalu lancar dan mendapatkan beberbagai macam hambatan tetapi tetap dilaksanakan hingga tuntas meski membutuhkan waktu yang lama.

b. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Hambatan

Pada pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Pantai Cermin yang sudah cukup sesuai dengan apa yang direncanakan seperti ada beberapa jumlah fasilitas yang sudah diperbaiki dan dibuat yaitu seperti Posyandu sebagai fasilitas kesehatan, Pos Kamling sebagai Fasilitas Keamanan, perbaikan jalan serta sebagian penyediaan air bersih. Hal ini membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam hal keamanan, kesehatan dan juga akses jalan. Namun dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur ini memiliki hambatan yang sangat menonjol yaitu partisipasi masyarakat dan juga banyaknya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

c. Partisipatif Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur

Menurut kepala desa selaku narasumber menyatakan bahwa:

"Bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dalam pembangunan desa ini? Ya masyarakat ini kan bermacam macam yakan, tapi kalau sepanjanng ini, yang bapak liat partisipasi masyarakat kurang dalam hal pembangunan, Tergantung, kalau berapa jumlahnya, desa ini kan terbagi juga ke dusun-dusunnya, jadi yang partisipasi ya pasti di setiap dusunnya masing-masing".[1]

Pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pantai Cermin sendiri kurang dalam pembangunan walaupun sebagian warga di setiap dusun memang ada yang berpartisipasi tetapi tidak sebanyak yang seharusnya.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga di sampaikan oleh masyarakat selaku narasumber yaitu bu Sri yaitu:

"Bagaimana bentuk partisipasi yang bapak/ibu lakukan? Kalau kami ibu-ibu ini palingan kalau ada yg gotong-royong ya kami hanya bisa buat-buatkan makanan ringan dan minum saja"

"Apakah masyarakat terlibat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur publik di desa? Kalau seperti itu mana ada di ajak mereka, ya palingan yang

[1]Bapak Komeri Edi, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Pantai Cermin, (Langkat, 14 Juli 2021 Pukul 15.00 WIB)

di desa desa aja itu, itu pun kalau ada mereka buat evaluasi-evaluasi itu, habis di bangun yaudah tidak ada di lihat-lihat lagi".[2]

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk kalangan ibu-ibu mereka dapat membantu kegiatan dengan membuat makanan dan minuman untuk para warga yang melakukan gotong-royong. Dan untuk pengevaluasian bangunan infrastruktur dapat dilihat bahwa warga biasa tidak dilibatkan dalam hal ini, ketika semua selesai tidak ada pengavluasian berikutnya. Hal ini lah yang membuat masyarakat tidak memiliki partisipatif karena tidak ada ajakan dari pemerintah desa untuk bersama membangun infrastruktur desa, yang membuat warga tidak bisa menyampaikan aspirasinya.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Analisis Implementasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa Pantai Cermin

Berdasarkan pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan malalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatn sumber daya alam dan lingkungan secara berkelnjutan.

Pembangunan pada dasarnya meru akan upaya pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa (*goods and service).* Salah satu instrumen penting dalam ketersediaan infrastruktur desa. Program pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan program yang di nilai memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan desa yang sampai saat ini masih terus dilakukan dan secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan yang

---

[2]Ibu Sri Dewi, Hasil Wawancara Pribadi, Warga Desa Pantai Cermin, (Langkat, 16 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB)

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat desa sehingga dapat memecahkan masalah yang terjadi.

Dalam penelitian ini yang dilakukan di Desa Pantai Cermin melalui hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, implementasi perencanaan pembangunan infrastruktur publik dilakukan setiap akhir tahun dengan diadakannya musyawarah lalu pada awal tahun ketika dana turun maka pembangunan akan dilaksanakan walaupun.

Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah Desa Pantai Cermin adalah dalam bidang infrastruktur terutama pembangunan pengadaan air bersih di dusun-dusun terutama pada dusun yang benar-benar susah mendapatkan air bersih, dan juga pembangunan pos kamling demi keamanan warga

Ada beberapa yang belum dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana mestinya salah satunya adalah penyedian air bersih yang belum merata. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat dalam kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, masak, dan juga untuk minum bagi masyarakat yang tidak bisa minum air isi ulang. Belum lagi kalau musim kemarau sudah tiba maka masyarakat kebingunan untuk mencari air bersih kemana, sedangkan air sungai sudah tidak bisa digunakan lagi karena sudah penuh dengan tetumbuhan dan lumut. Kemudian pembangunan tempat untuk pos kamling yang berada di ujung dan tidak berada di tengah pemukiman yang membuat masyarakat saat menjaga malam memilih untuk berada di teras-teras rumah warga.

Pembangunan infrastruktur publik lainnya juga ada seperti pembangunan posyandu yang selalu dipergunakan untuk kesehatan-kesehatan para ibu-ibu dan anakanya, juga ada beberapa pembangunan seperti saluran air dan perbaikan jalan yang akan membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam hal kesehatan dan juga akses ke daerah lain.

Kegiatan implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa ini mengalami beberapa hambatan yang membuat

pelaksanannya menjadi tidak sempurna ataupun tidak sesuai perencanannya, yaitu seperti banyaknya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dan hambatan yang paling menonjol adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat. Dalam suatu proses pembangunan keberhasilannya tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat dan bagaimana kepuasan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang sudah di laksanakan. Karena pembangunan ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam proses pembangunan infrastruktur seluruhnya dilakukan dengan basis partisipasi masyarakat, yakni masyarakat yang terjun langsung dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati manfaat berbagai pembangunan infrastruktur yang semua biayanya dari pemerintah.

2. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pembangunan di Desa Pantai Cermin

Pembangunan pedesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan dari awal dan nyata pada pihak seluruh pemegang kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Bagi masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektifitas dan efisiensi maka pembangnunan akan meningkat.

Desa merupakan bagian terkecil dari kepemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah desa dapat mengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM).

Alasan yang paling utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencaan yaitu: pertama, sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan salah satu carauntuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Kedua, sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat. Ketiga, masyarakat memperoleh hak untuk berkontribusi dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Terkait dengan partisipasi masyarakat, ada empat bentuk partisipasi masyarakat, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.Dalam melakukan perencanaan pembangunan dibutuhkan keikutsertaan masyarakat, oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pembangunan tidak saja berada pada tangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat desa tersebut.

Demi mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan warga, maka diperlukan adanya partisipasi dari setiap bagian dari desa dan perlunya kritik dan saran respon dari puas atau tidaknya dari masyarakat terhadap pembangunan desa yang sudah dilaksanakan.

Secara umum, masyarakat Desa Pantai Cermin sudah melaksanakan poin partisipasi tersebut, namun terkadang tingkat partisipasinya masih dikatakan rendah seperti yang dikatakan dalam wawancara dengan kepala desa. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertakan masyarakat yang dengan sadar dan suka rela turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk mulai dari pembangunan hingga keikutsertaan dalam berbagai hal yang ada di Desa. Salah satu contohnya yaitu para ibu-ibu yang berpartisipasi dalam kegiatan gotong-royong dengan menyediakan

makanan dan minuman, para bapak-bapak yang ikut gotong-royong dan hanya sebagian warga saja yang ikut kegiatan musrenbang.

Dari hasil wawancara partisipasi masyarakat Desa Pantai cermin digolongkan rendah diakibatkan oleh pihak desa yang tak mengikutsertakan para warganya dan rendahnya ajakan pemerintah setempat untuk bekerja sama, seperti dalam pengevaluasian pembangunan yang hanya diikuti oleh orang-orang tertentu, hal ini yang membuat masyarakat tidak bisa memberikan kritik maupun sarannya

3. Analisis Peran Pemerintah Desa Pantai Cermin untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa Pantai Cermin

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan peran pemerintah Desa Pantai Cermin untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh kepala desa yaitu:

"Kalau yang kami lakukan palingan mengajak setiap ada musrenbang dan juga kalau semisal ada gotong royong dan juga ada kalau ada pembangunan yang bakal di bangun kami pasti mengajak buat meminta saran mereka".[3]

Dalam pernyataan wawancara di atas dapat simpulkan bahwa pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut musrenbang dan gotong-royong untuk memaksimalkan kegiatan pembangunan infrastruktur publik, hal ini memang dirasakan oleh warga setempat tetapi beberapa warga menyatakan hal itu jarang dilakukan oleh pemerintah setempat dan apabila kegiatan itu sedang terlaksana hanya beberapa warga saja yang diajak, seperti pada pernyataan salah satu narasumber yaitu bu Sri dan pak Syarif dan pak Suarmin

[3]Bapak Komeri Edi, Hasil Wawancara Pribadi, Kepala Desa Pantai Cermin, (Langkat, 14 Juli 2021 Pukul 15.00 WIB)

"Sepanjang ini ya paling mengajak musrenbang itupun di pilih-pilih orangnya kan begitu tidak adil."[4]

"Ya ngajak gotong-royong itu pun jaranglah di sini gotong-royong. Parit-parit sampai tumpat banjir kalau sudah hujan deras."[5]

Dari pernyataan di atas pemerintah desa dan warga memiliki hubungan yang kurang baik ataupun sedikitnya komunikasi antara pemerintah desa dan warganya yang membuat sebagian warga hanya memendam aspirasinya.

---

[4]Ibu Sri Dewi, Hasil Wawancara Pribadi, Warga Desa Pantai Cermin, (Langkat, 16 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB)

[5]Bapak Syarif, Hasil Wawancara Pribadi, Warga Desa Pantai Cermin, (Langkat, 17 Juli 2021 Pukul 16.00 WIB)

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam implementasi perencanaan pembangunan di Desa Pantai Cermin sudah berjalan cukup baik seperti dalam perencanannya, tetapi hanya saja diperlukan kesepakatan dalam menentukan bangunan atau posisi di mana bangunanan agar kebutuhan masyarakat Desa Pantai Cermin benar-benar terpenuhi dan tidak ada lagi ketimpangan dalam membuat hasil keputusan .
2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan Pembangunan di Desa Pantai Cermin, masyarakat di desa ini memiliki tingkat partisipasi yang cukup rendah terbukti dari hasil wawancara yang mengatakan ada warga yang memang tidak mengikuti dan ada sebagian warga yang ingin berpartisipasi namun tidak meratanya ajakannya dari pemerintah desa setempat.
3. Peran Pemerintah untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Publik di Desa Pantai Cermin. Di desa ini peran pemerintah dapat dikatakan cukup dengan mereka mengajak untuk musrenbang dan bergotong-royong, tetapi tidak cukup adil bagi masyarakat setempat, sebab masyarakat setempat merasa bahwa pemerintah hanya mengajak warga-warga terntentu saja seperti dalam salah satu hasil wawancara oleh ibu Sri yang menyatakan “Sepanjang ini ya paling mengajak musrenbang itu pun di pilih-pilih orangnya kan begitu tidak adil.” Seharusnya pemerintah desa bisa lebih merangkul semua warganya sehingga peran penting sebagai pemerintah dalam membangun menjadi lebih baik lagi.

B. Saran

Adapun saran yang bisa peneliti tuliskan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Warga Desa Pantai Cermin

   Dalam hal ini warga diharuskan untuk tetap berani mengatakan pendapatnya secara langsung kepada pemerintah desa dengan berbagai keluhan yang selama ini dirasakan agar aspirasi masyarakat dapat tertampung dan dapat dibenahi, jangan hanya menunggu ajakan atau perintah dari pemerintah desa saja, sebagai warga tentu saja kita boleh memberi kritik dan saran yang membangun untuk pemerintah desa khususnya pada kepala desa.

2. Bagi Pemerintah Desa Pantai Cermin

   Dalam hal ini pemerintah desa harus lebih memperhatikan keinginan sesungguhnya dari apa yang dibutuhkan masyarakatnya agar infrastruktur yang dibangunpun dapat sangat dirasakan manfaatnya oleh warga-warganya dan ketika sedang melakukan musyawarah atau sebagiannya ajak atau ikut sertakan warga-warga dari setiap dusun agak semua keluh kesah yang warga rasakan dapat tertampung, dan tingkatkan lagi rasa antar warga dengan kepala desa agar menjadi lebih erat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. S. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan.* Malang: Averroes Press. 2006.

Abe, A. *Perencanaan Daerah Partisipatif.* Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. 2005.

Budiarjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT Gramedia. 1982.

Harahap, Isnaini. "*Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*". Medan: Perdana Publishing. 2018.

Harahap, Sunarji. *Pengantar Manajemen Pendekatan Integratif Konsep Syariah.* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press). 2016

Herdiansyah, H. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Ikhsan, A. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: Citapustaka. 2014.

Imsar. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia Periode 1989-2016*. Volume 5. No. 1 Januari – Juni 2018.

Media. Koodatie, R. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

Krishna, A. T. *Pembangunan Berbasis Masyarakat.* Bandung: Alfabeth. 2015.

Mardikanto. *Tanggung Jawab Sosial Koorporas.* Bandung: Alfabeth. 2014.

Putra, F. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik.* Yogyakarta. 2003.

Rahardjo, A. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi.* Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016.

Riant Nugroho, W. R. *Manajemen Pembangunan Indonesia: sebuah pengantardan panduan.* Jakarta: Media Komputindo.

Rifa'i, M. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim; Terjemah/Tafsir Al-Qur'an* . Semarang: Wicaksana. 1993.

Solichin, A. W. *Analisa Kebijakan Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara.* malang: Bumi Aksara. 1990.

Sosilowati, D. *Pengantar Ekonomi.* Malang: Universitas Muhammadiyah. 2011.

Suhardjo, A. *Geografi Pedesaan Sebuah Antologi.* Yogyakarta: Ideas Media. 2008.

Suparmoko, M Irwan. *Ekonomi Pembangunan Desa.* Jakarta: Duta Aksara. 2002.

Supriatna, T. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan.* Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

Stephen C, Smith T, Michael R. *Pembangunan Ekonomi: Edisi Kesebelas.* Jakarta: Penerbit Erlangga. 2001.

Tarigan, Azhari Akmal. dkk. Metodologi Penenlitian Ekonomi Islam. La-Tansa Press. 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Otonomi Daerah

Jurnal :

Alfiaturrahman, Pislawati. *"Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalauan".* Jurnal Valuta. Vol. 2 No. 2. 2016.

Fadil, Fathurrahman. *"Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kota Baru Tengah".* JurnalIlmu Politik dan Pemerintahan Lokal. Vol. 2 No. 2. 2013.

Harahap, J, dan Nasution, M. Rizki. *"Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Program SANIMAS (IsDB) Di KelurahanTanjung Gusta Kota Medan.* Jurnal Tansiq. Vol. 3 No. 1. 2020

Imtihan, Husnul. Wahyunadi, dan Firmansyah. *"Peran Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Mataram. Vol. 11 No. 1. 2017.

Kambu, Arius. "*Perencanaan Partisipatif Dengan Pendekatan Fenomenologi Di Distrik Kombut Kabupaten Boven Digoel".* Jurnal Keuda. Vol. 2 No. 2.

Noor, Siswidiyanto, dan Berlin. *"Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pada Lokasi Dampak Semburan Lumpur Lapindo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo".* Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Vol. 3 No. 1. 2019.

Ridha, Fahrul. "*Analisis Pengelolaan Dana Desa".* Jurnal Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Vol. 4 No. 2. 2019.

Rosmita, dan Abdur Rahman. *"Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Gemilang Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indra Giri Hilir".* Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi. Vol. 1 No. 2. 2019.

Walid, dan Kepastian. *"Peran Kecamatan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang".* Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Vol. 1 No. 11-22. 2016.

Skripsi dan Tesis:

Dzulkhijiana, Atika. *"Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Pembangunan Infrastrukrur Pedesaan (PPIP) di Kecamatan Banyu Biru Kabupaten Semarang".* Skripsi, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang. 2015.

WEBSITE:

Maltus, Thomas Robert. "*The Essay on The Principle of Population"*

"http:/www.ajarekonomi.com"

https://www.literasipublik.com/pengertian-publik

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-pembangunan-menurut-para-ahli/

https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/

https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-perencanaan-menurut-

para-ahli/

LAMPIRAN

Lampiran 1

Foto Dokumentasi

Kantor Kepala Desa Pantai Cermin

Kondisi Pos Kamling Dusun Ampera

Kondisi Jalan Dusun Teladan yang Belum di Aspal

Kondisi Posyandu Kamboja

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Narasumber 1. Bapak Komeri Edi, Kepala Desa Pantai Cermin

	Materi Wawancara
Peneliti :	Bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur desa pada saat ini ? Ada berapa jumlah fasilitas desa yang sudah diperbaharui?
Informan :	Pelaksanaan nya ya sesuai dengan apa yang di rencakanan sebelumnya, tetapi ada juga yang belum dapat di laksanakan. Kalau jumlah fasilitas yang sudah di pebarui ya lumayan juga. Contohnya adanya pos kamling, perbaikan jalan menuju pemakaman, dan lain lain bisa di lihat juga di dusun dusun itu nanti.
Peneliti :	Apa saja perubahan yang dirasakan dalam pembangunan infrastruktur publik di desa?
Informan :	Kalau perubahan ya masyarakat menjadi mudah dalam hal keamaanan, kesehatan dan juga akses ke daerah lain.
Peneliti :	Apa saja hambatan yang ditemui saat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa?
Informan :	Yang paling menonjol sih kurang partisipasi dari masyarakat sih, dan juga banyaknya pembangunan yang di butuhkan masyarakat jadi nya bingung mana dulu yang akan di bangun.
Peneliti :	Bagaimana pelaksanaan program yang direncanakan selama ini? Apakah berjalan dengan lancar?
Informan :	Ya kalau pelaksanaan nya pasti ada hambatan yang kayak bapak jelasin tadi, tapi kita kan tetap kerjakan sampai tuntas walau kadang molor.

Peneliti :	Sejak kapan pembangunan infrastruktur desa ini berjalan?
Informan :	Kalau sejak kapan nya ya setiap akhir tahun itu kan bakal ada musyawarah jadi awal tahun setelah dana turun dari pusat bakal langsung dilaksanakan
Peneliti :	Bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dalam pembangunan desa ini?
Informan :	Ya masyarakat ini kan bermacam macam lah yak an, tapi kalau sepanjanng ini sih yang bapak liat partisipasi masyarakat kurang dalam hal pembangunan
Peneliti :	Berapa jumlah masyarakat yang ikut serta dalam partisipasi pembangunan desa?
Informan :	Tergantung sih kalau berapa jumlahnya, desa ini kan terbagi juga ke dusun dusun nya, jadi yang partisipasi ya pasti di setiap dusun nya masing masing
Peneliti:	Apa saja yang dilakukan pemerintah setempat untuk membangun partisipasi masyarakat?
Informan	Kalau yang kami lakukan ya palingan mengajak setiap ada musrenbang dan juga kalau semisal ada gotong royong dan juga ada kalau ada pembangunan yang bakal di bangun kami pasti mengajak buat meminta saran mereka

Narasumber 2. Ibu Sri Dewi (Warga Desa Pantai Cermin)

	Materi Wawancara
Peneliti :	Bagaimana bentuk partisipasi yang bapak/ibu lakukan?
Informan :	Kalau kami ibuk ibuk ini ya palingan kalau ada yg gotong royong ya kami palingan bisa buat buatkan snack dan minum aja

Peneliti :	Apa saja perubahan yang dirasakan dalam pembangunan infrastruktur publik di desa?
Informan :	Kalau bangunan di desa ini yang kami rasakan apa ya, ya kayak posyandu lah,itu pun yang punya anak kecil aja, terus apa ya gak banyak juga bangunan di sini.
Peneliti :	Apakah masyarakat terlibat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur publik di desa?
Informan :	Kalau kayak kayak gitu mana ada di ajak mereka, ya palingan yang di desa desa aja itu, itu pun kalau ada mereka buat evaluasi evaluasi itu, habis di bangun yaudah gadak di liat liat lagi
Peneliti :	Apa tujuan dan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik desa, sejauh ini apakah program pembangunan dapat berjalan dengan baik?
Informan :	Kalau lancar ya lancar lah yakan, tapi ya gitu banyak kali bangunan nya gak bisa banyak orang yang rasain,kayak air bersih di bangun malah di bangun dekat rumah kades nya di sekeliling itu keluarga nya semua jadi yang lain gak bisa ngerasain. Terus pos kamling itu di bangun di depan rumah kadus nya ya warga sini gak mau jaga disitu karena di ujung bukan di tengah tengah dusun, terakhir yang jaga malam di teras rumah orang
Peneliti :	Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mendasari untuk berpartisipasi?
Informan :	Ya gimana kalau itu ya kami gak ada di ajak apalagi kami kaum ibuk ibuk kan, padahal banyak yang mau kami luapkan kalau di ajak bahas pembangunan ini. Bukan kami mau buat hancur desa tapi kan untuk membangun biar sejahtera warganya

Peneliti :	Apa saja yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengajak warga dalam membangun infrastruktur publik?
Informan :	Sepanjang ini ya paling ngajak musrenbang itu pun di pilih pilih orangnya kan kek gitu gak adil.

Narasumber 3. Pak Syarif (Warga Desa Pantai Cermin)

	Materi Wawancara
Peneliti :	Bagaimana bentuk partisipasi yang bapak/ibu lakukan?
Informan :	Kalau partisipasi ya palingan gotong royong ajalah, yang lain mana ada. Gotong royong pun jarang
Peneliti :	Apa saja perubahan yang diraskan dalam pembangunan infrastruktur publik di desa?
Informan :	Kalau perubahan adalah tapi ya gitu pembangunan di sini di bangun tapi gabisa di rasakan manfaatnya, cuman sekedar di bangun aja, gak di pikirkan manfaatnya itu.
Peneliti :	Apakah masyarakat terlibat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur publik di desa?
Informan :	Kalau evaluasi gak ada terlibat kami. Mau kritik pun gabisa. Percuma lah. Habis di bangun dah gak ada evaluasi evaluasi gitu. Yang penting kebangun aja Nampak sama masyarakat
Peneliti :	Apa tujuan dan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik desa, sejauh ini apakah program pembangunan dapat berjalan dengan baik?
Informan :	Kalau lancar ya lancar aja, tapi setelah di bangun gak lancar ke masyarakat karena manfaat nya gak ada. Palingan ada juga itu pembangunan yang gak kebangun.

Peneliti :	Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mendasari untuk berpartisiapsi?
Informan :	Ya faktor pemghambat nya dari pihak desa sendiri tidak ada mengikut sertakan kami sebagai warga nya
Peneliti :	Apa saja yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengajak warga dalam membangun infrastruktur publik?
Informan :	Ya ngajak gotong royong itu pun halah jarang lah di sini gotong royong. Parit parit sampai tumpat banjir kalau udah hujan deras.

Narasumber 4. Bapak Suarmin (Warga Desa Pantai Cermin)

	Materi Wawancara
Peneliti :	Bagaimana bentuk partisipasi yang bapak/ibu lakukan?
Informan :	Di desa ini aparatnya wawasannya agak rendah pak, gotong oyong pun kadang terhambat dan tidak dilaksanakan. Yaa partisipasi saya gotong-royong lah paling pak
Peneliti :	Apa saja perubahan yang dirasakan dalam pembangunan infrastruktur publik di desa?
Informan :	Yang dirasakan hanya sebagian kecil karena tidak tepat sasarannya pak, misal kita buku air bersih tapi yang di buat malah pos kamling
Peneliti :	Apakah masyarakat terlibat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur publik di desa?
Informan :	Masyarakat dan pemerintah desa masih renggang pak
Peneliti :	Apa tujuan dan manfaat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur publik desa, sejauh ini apakah program pembangunan dapat berjalan dengan baik?

Informan :	Kalor untuk desa pantai cermin masih kurang pak
Peneliti :	Apa saja yang dilakukan pemerintah setempat untuk mengajak warga dalam membangun infrastruktur publik?
Informan :	iya ada musrenbang atau gotong-royong tapi saya tidak pernah ikut.